



Karir Politik Alamsjah Ratu Perwiranegara: Dari Duta Besar hingga Menteri Agama 1972-1983

Neti Lidia Watina*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 netilidiawatio26@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the political journey of Alamsjah Ratu Perwiranegara, from his role as an Ambassador to his tenure as Minister of Religious Affairs. The study employs historical research methods, including heuristic, critical analysis, interpretation, and historiography. The primary sources include Alamsjah's own works and various other literatures discussing his contributions. The findings reveal that Alamsjah Ratu Perwiranegara demonstrated exceptional dedication to improving the welfare and unity of the Indonesian people, particularly in the religious sector. One of his most significant contributions was the establishment of the Amal Bhakti Pancasila mosques across Indonesia, which remain places of worship for Muslims to this day. Additionally, he introduced the "Trilogy of Religious Harmony," aimed at fostering unity and togetherness amidst the diversity of religious beliefs in Indonesia. This trilogy emphasized the importance of dialogue, respect for differences, and collaboration among religious communities, strengthening tolerance and interfaith harmony in Indonesia. These findings underscore the continued relevance of Alamsjah's ideas in promoting harmony within a pluralistic society.

Keywords: Political Career, Alamsjah Ratu Perwiranegara, Diplomacy, Religious Harmony

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji perjalanan politik Alamsjah Ratu Perwiranegara, mulai dari Duta Besar hingga Menteri Agama. Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber utamanya adalah karya-karya Alamsjah sendiri dan berbagai literatur lain yang membahas tentang kiprahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alamsjah Ratu Perwiranegara memiliki dedikasi yang luar biasa dalam mensejahterakan dan menyatukan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang keagamaan. Salah satu kontribusi signifikan yang ia tinggalkan adalah pendirian masjid Amal Bhakti Pancasila di seluruh Indonesia, yang hingga kini tetap menjadi tempat ibadah umat Islam. Selain itu, ia mencetuskan trilogi kerukunan antar umat beragama, yang bertujuan menciptakan kebersamaan dan persatuan di tengah keberagaman keyakinan masyarakat Indonesia. Trilogi ini menekankan pentingnya dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan kolaborasi antar komunitas keagamaan, yang telah memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Temuan ini menegaskan relevansi ide-ide Alamsjah dalam membangun harmoni di masyarakat pluralis.

Kata Kunci: Karir politik, Alamsjah Ratu Perwiranegara, Diplomasi, Kerukunan Umat Beragama

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بحث المسيرة السياسية لألامسجاه راتو بيرويرانيجارا من سفير إلى وزير للشؤون الدينية. ويستخدم هذا البحث منهج البحث التاريخي الذي يتضمن مراحل الاستدلال والنقد والتفسير والتأريخ. والمصادر الرئيسية هي أعمال ألامسجاه نفسها ومختلف المؤلفات الأخرى التي تناقش أعمالها. تُظهر النتائج أن ألامسجاه راتو بيرويرانيجارا كان له تفانٍ غير عادي في رفاهية المجتمع الإندونيسي ووحده، وخاصة في المجال الديني. ومن بين الإسهامات المهمة التي تركتها هي بناء

*Corresponding author

مسجد أمل باكتي بانتشامسيلا في جميع أنحاء إندونيسيا، والتي لا تزال مكانًا للعبادة للمسلمين حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، صاغ ثلاثية الوثام بين الأديان، والتي تهدف إلى خلق التآلف والوحدة وسط تنوع معتقدات المجتمع الإندونيسي وتشدد هذه الثلاثية على أهمية الحوار واحترام الاختلافات والتعاون بين الطوائف الدينية، مما عزز التسامح والوثام بين الأديان في إندونيسيا. وتؤكد النتائج التي تم التوصل إليها على أهمية أفكار ألامسجاه في بناء الوثام في مجتمع تعددي الكلمات المفاتيح: السيرة السياسية، ألامسجاه راتو بيرويرانيفارا، الدبلوماسية، الوثام الديني

Pendahuluan

Alamsjah Ratu Perwiranegara (Alamsjah) adalah salah satu tokoh penting Lampung yang berasal dari Kota Bumi. Ia berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Karesidenan Palembang pada masa revolusi (1945–1949). Lahir pada 25 Desember 1925 di Kampung Penagan Ratu. Anak bungsu dari pasangan Baharudin Yusuf dan Siti Mariam. Ia memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang militer yang penuh dedikasi. Sebelum masuk ke dunia politik, Alamsjah menempuh pendidikan kemiliteran di Senior Officers Course, Mhow, India, pada tahun 1959, serta Command and General Staff College di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia ditugaskan di Koplats TNI AD Bandung, tempat pertemuannya dengan Presiden Soeharto yang kemudian membuka jalannya menuju karir politik.¹

Karir politik Alamsjah dimulai dengan pengangkatannya sebagai Koordinator Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet Ampera. Ia kemudian menjabat berbagai posisi strategis, termasuk Sekretaris Negara (1968–1972), Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1975–1978), dan Menteri Agama (1978–1983). Perjalanan karirnya mencerminkan dominasi militer dalam struktur pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada era tersebut, militer tidak hanya mendominasi bidang eksekutif dan legislatif, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun stabilitas politik dan perekonomian.²

Penelitian mengenai Alamsjah selama ini lebih banyak menyoroiti kontribusinya dalam bidang kemiliteran, sementara aspek karir politiknya masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji peran politik Alamsjah pada periode 1972–1983. Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti bagaimana awal karir politik Alamsjah? Bagaimana kontribusi Alamsjah dalam dinamika politik Orde Baru, dan sejauh mana pengaruhnya dalam membentuk kebijakan pemerintahan di masa tersebut. Pada akhirnya, artikel ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami kiprah Alamsjah sebagai seorang tokoh politik dari Bumi Lampung.

Alamsjah pernah menjadi Menteri Agama pada masa Orde Baru. Ia menghadapi situasi yang penuh tantangan, terutama terkait hubungan pemerintah dengan umat Islam. Masa Orde Baru sering dianggap sebagai periode ketegangan antara negara dan komunitas Muslim. Ketegangan ini dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, muncul kembali aspirasi tokoh-tokoh Islam untuk merealisasikan ideologi Islam dalam politik, sebagaimana yang sempat terjadi pada era demokrasi parlementer. Di sisi lain, komunitas Muslim juga menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi.

Kiprah Alamsjah sebagai salah satu aktor penting dalam pemerintahan Orde Baru, khususnya dalam mendukung kebijakan integrasi militer dan politik, menjadi salah satu representasi peran strategis militer dalam pembentukan kebijakan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih jauh kiprah politik Alamsjah, sejak menjadi Duta Besar RI di Belanda hingga mediator antara pemerintah Orde Baru dan umat Islam dalam dinamika sosial-politik Indonesia.

¹ Suparwan G. Parikesit and Krisna R. Sempurnadaja, *H Alamsjah Ratu Perwiranegara: Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

² Aditia Muara Padiatra, 'Introduction To Malari : Dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh Pada Awal Orde Baru 1970 - 1974', *Criksetra*, 4.8 (2015), 103–19; Yusa Farchan, 'Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru', *Jurnal Adhikari*, 1.3 (2022), 152–61.

Penelitian mengenai Alamsjah selama ini lebih banyak menyoroiti kontribusinya dalam bidang kemiliteran,³ sementara aspek karir politiknya kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji peran politik Alamsjah pada periode 1972-1983. Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti bagaimana awal karir politik Alamsjah? Bagaimana kontribusi Alamsjah dalam dinamika politik Orde Baru, dan sejauh mana pengaruhnya dalam membentuk kebijakan pemerintahan di masa tersebut. Pada akhirnya, artikel ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami kiprah Alamsjah sebagai seorang tokoh politik dari Bumi Lampung.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup empat tahapan utama yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik atau pengumpulan sumber sejarah dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi buku-buku yang ditulis oleh Alamsjah terutama Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia⁴ dan Wilayah Kajian Agama di Indonesia,⁵ serta buku Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SKMA-RI) dari Tahun 1951 s.d. 1994. Sedangkan sumber sekundernya terutama adalah buku Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik,⁶ yang didalamnya terdapat gambarab mengenai perjalanan hidup Alamsjah yang ditulis oleh Masykuri Abdillah. Setelah itu dilakukan kritik sumber untuk mengevaluasi keabsahan dan relevansi sumber-sumber yang diperoleh, diikuti oleh interpretasi untuk memahami makna di balik data yang ada. Sumber-sumber tersebut dianalisis, diolah, dan dirangkai menjadi kisah sejarah yang disusun secara kronologis, kausalitas, dan imajinatif⁷ sehingga menghasilkan rekonstruksi kisah tentang karir politik Alamsjah Ratu Perwiranegara secara sistematis dan mendalam.

Pembahasan

Awal Karir Politik, 1966-1972

Karir politik Alamsjah dimulai pada era Orde Baru sebagai Koordinator Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet Ampera pada tahun 1966 hingga 1968. Dalam posisi ini, ia berperan penting membantu Presiden Soeharto menyusun dan mengelola staf pribadi, terutama dalam mendukung fungsi Ketua Presidium Kabinet Ampera. Dengan tanggung jawab khusus di bidang politik, Alamsjah membentuk dua tim utama, yaitu tim ahli politik dan tim ahli ekonomi. Kedua tim ini bertugas mengorganisir jadwal, pertemuan, kunjungan, serta kegiatan resmi Ketua Presidium.⁸

Sebagai pembantu dan penasihat pribadi, Alamsjah memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada Ketua Presidium terkait berbagai isu dan kebijakan strategis. Ia juga berperan sebagai penghubung dengan berbagai pihak, termasuk pejabat negara, anggota kabinet, duta besar, dan pihak terkait lainnya. Dalam kapasitasnya, Alamsjah bertanggung jawab memastikan keamanan dan kenyamanan Ketua Presidium dalam setiap kegiatan resmi maupun publik. Selain itu, ia menyediakan

³ Pedo Nopansyah, Alian Sair, and Farida Farida, 'Peranan Perwira Gyugun Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Di Palembang Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)', *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7.2 (2018); Suparman Arif and others, 'Sepanjang Jalan Pejuang (Peran Pejuang Dan Tokoh Lampung) Di Lampung', *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 8.1 (2022), 25-36; Carlos Hendrawan, Maskun Maskun, and Suparman Arif, 'Kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara Terhadap Penjaga Keamanan Rakyat Di Lampung Utara Tahun 1945', *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 7.4 (2019), 1-13.

⁴ Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1981).

⁵ Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Wilayah Kajian Agama Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982).

⁶ Azyumardi Azra and Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998).

⁷ Abd Rahman Hamid and M. Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2011).

⁸ Parikesit and Sempurnadjaja, p. 185.

informasi terkini mengenai situasi politik, ekonomi, dan sosial baik di dalam maupun luar negeri, sehingga membantu pengambilan keputusan yang strategis.

Alamsjah memainkan peran penting dalam menjaga hubungan harmonis antara Ketua Presidium dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran kerja sama dalam pemerintahan. Ia memastikan kepatuhan terhadap protokol dan norma dalam acara resmi maupun internasional, sehingga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengalaman dan pengetahuan Alamsjah menjadikannya sosok yang mampu menjalankan tugas ini dengan cermat dan profesional. Kontribusinya pada era Kabinet Ampera sangat signifikan dalam mendukung efektivitas tugas Ketua Presidium.

Setelah masa jabatannya sebagai Koordinator Staf Pribadi selesai, Alamsjah melanjutkan karir politiknya sebagai Menteri Sekretaris Negara dari tahun 1968 hingga 1972. Dalam posisi ini, ia menjadi figur kunci yang bertanggung jawab mengelola administrasi pemerintahan, termasuk koordinasi antar-departemen dan lembaga untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan efektif. Sebagai penasihat utama Presiden, Alamsjah memberikan masukan dan rekomendasi terkait isu-isu strategis dan kebijakan negara.⁹

Alamsjah menjadi penghubung antara Presiden dan berbagai institusi pemerintah, memastikan keputusan Presiden dilaksanakan dengan baik oleh lembaga terkait. Selain itu, Alamsjah terlibat dalam menjaga dan mengembangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain, mendorong kerja sama internasional yang menguntungkan bagi Indonesia. Di sektor pemerintahan, ia aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Sebagai penjaga protokol kenegaraan, Alamsjah memastikan bahwa seluruh kegiatan resmi, termasuk kunjungan kenegaraan, mengikuti etiket dan tata cara yang telah ditetapkan.

Peran dan kontribusi Alamsjah selama periode ini menunjukkan keahliannya dalam menjalankan tugas-tugas strategis dalam pemerintahan, sekaligus memperkuat fondasi politik dan administrasi pada masa awal Orde Baru. Pada masa ini, politik dan kekuasaan di Indonesia berada di bawah dominasi tokoh-tokoh militer, mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah.

Duta Besar RI di Belanda, 1972–1973

Pada Februari 1972, Alamsjah dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, menggantikan Letjen Taswin Natadiningrat. Pelantikannya berlangsung di tengah pentingnya hubungan Indonesia dengan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 23–24 Februari 1967 di Amsterdam. IGGI merupakan platform kerja sama internasional yang berfokus pada pemberian bantuan ekonomi kepada Indonesia pada masa Orde Baru. Menurut Alamsjah, jabatan ini menarik tetapi penuh tantangan karena ia harus menunaikan beberapa tugas utama sebagai duta besar, yaitu: pertama, mensukseskan sidang Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI); kedua, meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda; dan ketiga, menyelesaikan masalah dengan anggota Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda yang kerap menciptakan gangguan.¹⁰

Alamsjah memiliki keunggulan personal dalam menjalin hubungan dengan pihak Belanda. Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard sudah mengenalnya sejak ia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan ketua panitia penyambutan tamu kenegaraan. Hubungan yang baik ini mempermudah interaksinya dengan pihak kerajaan, bahkan hingga mendapatkan akses langsung melalui komunikasi telepon. Selain itu, komposisi kabinet Belanda saat itu—yang terdiri dari Partai Katolik (KVP), Partai Kontra-Revolusioner, dan Partai Liberal (VVD)—memiliki kesamaan pandangan politik dengan Indonesia. Di bawah Perdana Menteri Biesheuvel, hubungan bilateral semakin erat berkat kerja sama Alamsjah dengan Menteri Luar Negeri, Schmelzer, dan Menteri Urusan Kerja Sama Ekonomi, Boertin. Salah satu keberhasilan Alamsjah adalah mempererat hubungan bilateral dengan Belanda dan memuluskan agenda

⁹ Parikesit and Sempurnadjaja, p. 203.

¹⁰ Tomi Kusuma and Bahtiar Afwan, 'Upaya Membangun Stabilitas Nasional Pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru (1967-1971)', *Swarnadwipa*, 5.1 (2021), 18–28 (p. 23).

IGGI, termasuk memobilisasi dukungan dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan IMF untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia.¹¹

Dalam menjalankan tugas diplomatiknya, Alamsjah berhasil menciptakan pendekatan yang fleksibel dan efektif, mengubah hubungan yang sebelumnya kurang seimbang menjadi lebih harmonis. Beberapa menteri Belanda bahkan mengungkapkan bahwa Belanda memiliki "utang budi" kepada Indonesia, sehingga mendukung pemberian bantuan untuk pembangunan negara. Pendekatan personal Alamsjah, didukung oleh hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh penting seperti Ratu Juliana, Pangeran Bernhard, dan pejabat lainnya, menunjukkan keberhasilannya sebagai duta besar yang mampu memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Belanda. Dengan demikian, diplomasi yang dilakukan Alamsjah tidak hanya membawa hasil konkret dalam sidang IGGI tetapi juga meningkatkan citra Indonesia di mata pemerintah dan masyarakat Belanda.

Selain aktif meningkatkan hubungan bilateral dan mendukung agenda IGGI, Alamsjah juga menginisiasi berbagai kegiatan lain selama menjabat Duta Besar RI. Salah satunya adalah pembukaan pasar malam yang menampilkan barang-barang Indonesia. Acara ini diadakan di pusat kongres RAI, Amsterdam, dari tanggal 1 hingga 4 Juni, dengan sekitar 150 stan yang memamerkan berbagai produk Indonesia. Pameran tersebut mencakup produk makanan beku, makanan ringan khas Indonesia, serta pakaian tradisional yang menarik perhatian pengunjung.¹²

Selain itu, Alamsjah meresmikan Youth Center yang dibangun oleh pemerintah Belanda untuk mendukung pemuda Ambon. Peresmian pusat pemuda yang berlokasi di Zwolle ini dilakukan oleh Alamsjah atas nama pemerintah Indonesia. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi khusus kepada pemerintah Belanda atas perhatian dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat Ambon yang tinggal di Belanda. Langkah ini tidak hanya mempererat hubungan kedua negara, tetapi juga menunjukkan komitmen Alamsjah dalam membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas diaspora Indonesia di Belanda.¹³

Saat menjabat sebagai Duta Besar di Den Haag, Alamsjah dikenal sebagai sosok yang paling menarik perhatian, mendapatkan simpati, dan menerima penghargaan tertinggi di antara para diplomat Asia. Salah satu inisiatifnya yang mencerminkan hubungan baik antara Indonesia dan Belanda adalah koordinasi dengan pihak kepolisian di Den Haag untuk mengatur demonstrasi orang-orang Maluku Selatan di depan Kedutaan Besar Indonesia.¹⁴ Langkah ini mencerminkan kedekatan diplomatik yang telah terjalin dengan baik. Bahkan, pernyataan-pernyataan Alamsjah di sejumlah surat kabar Belanda menunjukkan gaya diplomasi yang tidak biasa dan inovatif.

Keputusan Alamsjah untuk meminta pergantian posisinya sebagai Duta Besar juga menjadi langkah strategis untuk menghindari potensi ketegangan dalam hubungan antara kedua negara. Kedekatannya dengan pejabat Belanda memungkinkan ia menuntaskan berbagai tugas yang diamanatkan oleh Presiden Soeharto dengan efektif, termasuk menyelesaikan agenda IGGI dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda.

Selama masa jabatannya, Alamsjah mengambil dua kebijakan penting. Pertama, semua bantuan keuangan luar negeri, terutama yang bersifat keagamaan, harus didaftarkan untuk memastikan transparansi dan pengelolaan yang baik. Kedua, ia mewajibkan pelatihan pasukan Indonesia dengan target penyelesaian dalam waktu dua tahun. Langkah-langkah ini menegaskan komitmen Alamsjah dalam mendukung pembangunan Indonesia sekaligus memperkuat kerja sama internasional selama masa tugasnya sebagai Duta Besar RI.¹⁵

Alamsjah aktif menjalankan program di KBRI Den Haag. Salah satu inisiatifnya adalah mengumpulkan dana sebesar 70.000 dolar yang dikelola oleh Barus Siregar, selaku Bendahara Sekolah

¹¹ Parikesit and Sempurnadjaja, pp. 224-25.

¹²NRC Handelsblad, 'Pasar Malam In De Rai', Nieuwe Rotterdamse Courant, Rotterdam., 24 mei, 1972.

¹³Vrijie Stem : Onafhankelijk Weekblad Voor Suriname, 'Opening Ambonnes Jeugdcentrum In Ned.', Stichting De Vrije Stem, Paramaribo., 2 april, 1973.

¹⁴NRC Handelsblad, 'Alamsjah', Nieuwe Rotterdamse Courant, 9 januari, 1974.

¹⁵Het Vrije Volk : Democratisch-Socialistisch Dagblad, 'Gehuwde Priesters Voor Indonisie Door Lambert Van Gelder.', De Arbeiderspers, Rotterdam., 31 mei, 1980.

Indonesia Nederland (SIN), bekerja sama dengan Direktur Utama Bank Indover—bank hasil kolaborasi antara Bank Indonesia dan bank Belanda. Dari total dana tersebut, 50.000 dolar merupakan bantuan yang disumbangkan oleh Direktur Utama Pertamina, Bapak Ibnu Sutowo. Setelah dana terkumpul dan dicairkan, Alamsjah menggunakan anggaran tersebut untuk membeli sejumlah fasilitas penting bagi SIN di Wassenaar. Fasilitas yang diperoleh meliputi gedung sekolah, asrama, dan bus pelajar, yang semuanya bertujuan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa Indonesia di Belanda. Langkah ini menunjukkan komitmen Alamsjah dalam meningkatkan sarana pendidikan bagi komunitas Indonesia di luar negeri.

Alamsjah berhasil menyelesaikan permasalahan kompleks terkait eks anggota RMS di Belanda, yang selama ini dikenal sering membuat keributan. Permasalahan ini membutuhkan pendekatan khusus untuk menyadarkan para pemuda RMS yang telah lama salah paham terhadap Indonesia. Para eks anggota RMS ini terpecah menjadi dua kelompok dengan pemikiran yang berbeda. Kelompok pertama adalah generasi tua, yang masih terjebak dalam pola pikir tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) era 1940-an dan memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Sementara itu, kelompok kedua adalah generasi muda yang lahir dan besar di Belanda, berpikir secara liberal, dan menjalani gaya hidup ala Barat. Pengetahuan mereka tentang Maluku hanya sebatas pada anggapan bahwa wilayah tersebut dijajah oleh Republik Indonesia, suatu pandangan yang sangat dangkal dan keliru.¹⁶

Selain perpecahan internal, eks anggota RMS juga sering melakukan aksi protes. Salah satu insiden mencatat sebagian besar orang Maluku Selatan menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta untuk menentang aksi anti-Indonesia yang dipimpin oleh Zuidmoltickers di Den Haag. Dalam demonstrasi tersebut, mereka membawa slogan-slogan yang mengecam kebijakan kolonial dan imperialistik Belanda terhadap rakyat Maluku. Bahkan, mereka membakar poster-poster sebagai simbol perlawanan. Sebuah delegasi dari kelompok tersebut diizinkan masuk ke kedutaan untuk menyerahkan petisi. Sebagai respons, pemerintah Indonesia memanggil perwakilan Belanda di Jakarta (Tuan Jonkman) untuk menyampaikan kekecewaan atas aksi demonstrasi itu.¹⁷

Beberapa tokoh RMS yang terkenal di Belanda, seperti Ir. Manusuma dan Tamaela, kerap menyebarkan informasi palsu. Mereka bahkan mengaku sebagai jenderal, padahal kenyataannya hanya memiliki pangkat pembantu letnan di KNIL. Dengan memahami latar belakang dan dinamika para anggota RMS ini, Alamsjah mengambil pendekatan yang diplomatis dan persuasif. Setiap tanggal 17 Agustus, ia mengundang tokoh-tokoh RMS beserta para pemudanya untuk menghadiri upacara pengibaran bendera di Den Haag. Acara ini dilanjutkan dengan jamuan makan dan kegiatan sosial, seperti pesta dan olahraga bersama warga Indonesia lainnya di Belanda.¹⁸

Meskipun pemerintah Belanda tidak memberikan jaminan keamanan bagi Alamsjah dalam menghadapi RMS, ia tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Melalui pendekatan ini, Alamsjah berusaha meluruskan kesalahpahaman dan membuka jalan dialog antara para tokoh serta pemuda RMS dengan pemerintah Republik Indonesia. Langkah-langkah tersebut menjadi bukti keteguhan Alamsjah dalam menjalankan misi diplomatik yang penuh tantangan ini.

Upaya pertama Alamsjah untuk mendekati anggota Republik Maluku Selatan (ex-RMS) dilakukan pada 17 Agustus 1973, yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang. Dalam pertemuan tersebut, ia mengajak mereka untuk melupakan masa lalu dan menyelesaikan kesalahpahaman yang telah berlangsung lama. Alamsjah menyarankan kepada para ex-RMS untuk menentukan pilihan kewarganegaraan, antara Belanda atau Indonesia, agar status mereka jelas. Bahkan, ia memberi kesempatan kepada 25 ex-RMS untuk mengunjungi Indonesia, khususnya Maluku, guna melihat langsung kondisi yang sebenarnya.

Kunjungan para anggota ex-RMS ke Indonesia, terutama ke Maluku, membuat mereka tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh Alamsjah pada upacara 17 Agustus 1973. Melalui proses silaturahmi, sekitar 25 pemuda ex-RMS dikirim untuk melihat langsung perbedaan antara cerita yang

¹⁶ Parikesit and Sempurnadjaja, p. 225.

¹⁷De Tijd: Dagblad Voor Nederland, 'Molukkers Betogen Bij Ambassade In Djakarta.', N.v Drukkerij De Tijd, Amsterdam., 1974.

¹⁸ Azra and Umam, pp. 358–359.

berkembang di Belanda dan kenyataan di Indonesia, khususnya di Maluku. Alamsjah segera menghubungi Dr. Siwabessy, seorang Menteri Kesehatan yang berasal dari Maluku, untuk mengatur kunjungan tersebut.¹⁹

Hasil kunjungan ini membuka mata para pemuda ex-RMS dan mengubah pemikiran mereka. Mereka mulai menyadari kenyataan yang berbeda dengan yang mereka dengar di Belanda, terutama mengenai situasi di Maluku. Para ex-RMS mulai mencaci maki dua tokoh yang mereka anggap sebagai pemimpin di Belanda, yaitu Manusuma dan Tamaela, yang selama ini memprovokasi ketegangan antara Indonesia dan Maluku. Ternyata, kedua tokoh ini sudah mengetahui sejak tahun 1950-an bahwa Maluku sudah memiliki universitas, dan lebih dari 1.000 anak Maluku telah lulus dari Universitas Pattimura Ambon, sementara anggota ex-RMS di Belanda tidak mencapai apa-apa.

Hubungan Alamsjah dengan anggota ex-RMS semakin akrab, terbukti dengan undangan dari salah satu keluarga ex-RMS yang mengajak anak-anak Alamsjah untuk ikut memanen apel di Appeldoorn. Meskipun demikian, masalah mengenai ex-RMS belum sepenuhnya terselesaikan, karena masih ada beberapa anggota ex-RMS yang berdemonstrasi di Belanda. Namun, Alamsjah sudah membuat perjanjian kerjasama dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah ini. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa para ex-RMS yang bersedia kembali ke Indonesia akan diberi tunjangan sebesar 80.000 gulden. Perjanjian ini disetujui langsung oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara dan Perdana Menteri Biesheuvel, namun Departemen terkait di Belanda hanya menyetujui tunjangan sebesar 30.000 gulden per orang.²⁰

Alamsjah dinilai berhasil menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar RI, seperti terlihat dari pencapaian dalam memperkuat hubungan Indonesia dengan IGGI, membangun hubungan bilateral yang erat dengan Belanda, serta menyelesaikan kesalahpahaman anggota RMS terhadap Indonesia. Masa tugasnya sebagai duta besar berakhir pada April 1974, setelah hampir dua tahun tinggal di Den Haag. Menjelang akhir masa tugasnya, kantor berita Indonesia melaporkan bahwa Alamsjah akan menduduki jabatan penting di tanah air.²¹

Pada April 1974, Alamsjah kembali ke Indonesia setelah dirawat di Rumah Sakit Wihelmina, Amsterdam, akibat flu berat (grip) yang dideritanya saat akan menghadiri sidang IGGI pada tahun 1973.²² Menurut saran Prof. Durer, dokter yang merawatnya, Alamsjah disarankan untuk tidak tinggal di daerah dengan iklim dingin jika ingin benar-benar pulih. Setelah menjalani perawatan selama satu minggu, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia.²³

Setelah kembali ke Tanah Air, Alamsjah beristirahat selama delapan bulan sebelum kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Jabatan duta besar yang ditinggalkannya digantikan oleh Letnan Jenderal Sutopo Yuwono, seorang perwira militer yang dikenal sebagai bagian dari kelompok intelektual militer, sama seperti Alamsjah. Dengan transisi tersebut, keberlanjutan diplomasi Indonesia di Belanda tetap terjaga.²⁴

Menteri Agama RI, 1978-1983

Pada akhir Desember 1973, saat menjabat sebagai Duta Besar di Belanda, Alamsjah jatuh sakit flu parah dan harus kembali ke Indonesia. Selama tahun 1974, ia vakum dan beristirahat. Namun, pada tahun 1975, Alamsjah dilantik sebagai anggota DPA. Selama masa jabatannya di DPA, ia memiliki dua tugas utama: memberikan respons terhadap pertanyaan Presiden dan menyusun pertimbangan yang akan disampaikan kepada Presiden.²⁵

¹⁹ Parikesit and Sempurnadjaja, p. 227.

²⁰ Parikesit and Sempurnadjaja, p. 228.

²¹NRC Handelsblad, '*Indonesische Ambassadeur Terug Naar Zijin Land*', Nieuwenhuis, Groningen.,9 febuari, 1974.

²²Leeuwarder Courant: Hoofdblad Van Friesland, '*Ambassadeur Van Indonesie Verlaat Nederland*', Stichting Leeuwarder Courant, Leeuwarden., 8 Febuari 1974.

²³ Parikesit and Sempurnadjaja, p. 235.

²⁴NRC Handelsblad, '*Nieuwe Indonesische Ambassadeur Juwono Opiniew Een Agaeneral*', Nieuwe Rotterdamse Courant, 1 April 1974.

²⁵ Parikesit and Sempurnadjaja, pp. 237-38.

Setelah rapat pleno, Alamsjah ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPA, menggantikan Letjen Sarbini yang telah wafat. Selain dua tugas utama tersebut, Alamsjah juga bertugas sebagai pembantu dan konsultan Presiden. Pada masa itu, hubungan antara DPA dan Presiden Soeharto kurang harmonis, terutama karena DPA secara terbuka mengkritik Presiden. Salah satu contohnya adalah saat Kongres Himpunan Pengamat Ilmu-Ilmu Sosial di Manado, di mana pidato yang seharusnya disampaikan oleh Ketua DPA, Wilopo, akhirnya dibacakan oleh Alamsjah karena Ketua DPA tidak dapat hadir.²⁶

Hubungan antara Presiden dengan anggota DPA mulai membaik setelah Sidang Majelis Umum PBB. Presiden Soeharto merespons secara positif terhadap kritik yang disampaikan oleh DPA dan segera mengambil tindakan untuk menangani masalah yang disoroti. Masa jabatan Alamsjah sebagai Wakil Ketua DPA berakhir pada Kabinet Pembangunan III, dan pada awal Maret 1978, ia diangkat menjadi Menteri Agama, menggantikan Prof. Dr. HA. Mukti Ali, dan menjabat hingga tahun 1983. Tugas yang diberikan oleh Presiden Soeharto saat itu sangat berat bagi Alamsjah, mengingat ia tidak memiliki latar belakang pendidikan agama. Banyak isu negatif muncul terkait jabatannya, bahkan ada tuduhan bahwa Alamsjah bukan seorang Muslim.²⁷

Meskipun tidak punya latar belakang keagamaan formal, Alamsjah sebenarnya sudah memiliki pengalaman dalam kegiatan keagamaan. Sebelumnya, ia pernah menjaga Masjid Baiturahman dan Masjid Istiqlal. Selain itu, ketika menjabat Sekretaris Presiden Soeharto, Alamsjah berperan sebagai amil zakat di Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Walaupun tidak berasal dari perguruan tinggi atau sekolah agama, Alamsjah sudah akrab dengan kegiatan keagamaan dan memiliki komitmen terhadapnya.²⁸

Alamsjah mendapat petunjuk dari kakeknya agar bisa menghargai dan mengambil hati umat Muslim. Sebelum menjalankan tugas pertamanya, ia juga dianjurkan untuk membaca buku-buku tentang Pancasila dan karya-karya tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Sukarno, Soepomo, Abdul Gafar Pringgodigdo, dan Ahmad Subardjo. Dengan bekal tersebut, Alamsjah siap menjalankan peran barunya sebagai Menteri Agama.

Selama menjabat Menteri Agama, Alamsjah memiliki beberapa tugas khusus. Tugas pertama adalah membina dan mengarahkan seluruh umat beragama agar bisa masuk dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.²⁹ Ia juga berperan dalam mengarahkan umat beragama di Indonesia untuk menjadi unsur pendukung dalam memperkuat stabilitas dan ketahanan nasional. Selain itu, Alamsjah bertugas menghilangkan keraguan dan kecurigaan yang telah berlangsung selama 33 tahun antara umat beragama dan pemerintah, sehingga keduanya bisa bersama-sama membangun negara yang berlandaskan Pancasila. Ia juga membimbing umat beragama untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan nasional dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.³⁰

Alamsjah menetapkan tiga hal utama dalam pembinaan kehidupan beragama. Pertama, penguatan ideologi Pancasila di kalangan umat beragama. Kedua, memperkuat stabilitas dan ketahanan nasional. Ketiga, meningkatkan peran serta umat beragama dalam menyukseskan pembangunan nasional berkelanjutan di segala bidang, demi menjamin persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila.³¹

Tugas utama yang akan dilaksanakan oleh Alamsjah adalah penguatan ideologi Pancasila di kalangan umat beragama. Sebelum dilantik secara resmi oleh Presiden Soeharto, Alamsjah diberikan

²⁶Sempurnadjaja. *H Alamsjah Ratu Perwiranegara: Jatuh Sakit dan Pulang ke Indonesia, Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu*, (Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.239-240.

²⁷Parikesit and Sempurnadjaja. *H Alamsjah Ratu Perwiranegara Semasa Menjadi Menteri Agama, Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu*, (Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.244-247.

²⁸ Depag, *Amal Bakti Departemen Agama RI, 3 Januari 1946-3 Januari 1996: 50 Tahun Departemen Agama: Eksistensi Dan Derap Langkahnya* (Departemen Agama RI, 1996), p. 79.

²⁹ Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Kehidupan Beragama Dalam Negara Pancasila* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982).

³⁰ Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama Di Indonesia*, p. 38.

³¹ Depag, *Amal Bakti Departemen Agama RI, 3 Januari 1946-3 Januari 1996: 50 Tahun Departemen Agama: Eksistensi Dan Derap Langkahnya* (Departemen Agama RI, 1996), pp. 80-81.

arahan untuk menjelaskan Pancasila kepada umat beragama, khususnya umat Islam. Presiden Soeharto menekankan pentingnya agar umat Islam tidak lagi memiliki sikap apriori terhadap Pancasila. Jika Pancasila tidak dipahami dengan jelas dan diterima oleh umat Islam, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap rapuh.³²

Sikap apriori yang muncul di kalangan umat beragama, khususnya umat Islam, terhadap Pancasila, menurut Alamsjah, disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, terdapat persoalan konstitusional mengenai landasan ideologi negara. Banyak yang bertanya mengapa Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Kedua, masalah politik yang memunculkan perdebatan tentang agama Islam, di mana beberapa kelompok lebih menekankan simbolisme agama daripada pengertian ajaran Islam yang terkandung dalam peraturan negara. Ketiga, permasalahan antaragama di Indonesia yang belum diselesaikan dengan tuntas. Permasalahan ini timbul karena penguatan ideologi Pancasila selama ini belum dijelaskan secara mendalam, meskipun pada akhirnya TAP MPR No. II/MPR/1978 menetapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Alamsjah menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama, dan sebaliknya agama tidak bisa dipancasilakan. Masing-masing umat beragama tetap berpedoman pada kitab sucinya. Untuk itu, perluasan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan Pancasila (P4) harus dilaksanakan dengan cara yang tidak membuat siapa pun merasa paling Pancasila. Sebab, ketika umat beragama mengamalkan ajaran agamanya, mereka sejatinya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila.³³ Untuk mendalami hal ini, Alamsjah memerintahkan penyebaran buku-buku mengenai P4 yang relevan untuk masing-masing agama, guna meningkatkan pemahaman umat beragama tentang pengamalan dan penghayatan Pancasila.³⁴

Alamsjah menegaskan bahwa "Pancasila adalah pengorbanan dan hadiah umat Islam untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia." Pernyataan ini mengacu pada sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia dalam merumuskan dasar negara. Pada sidang BPUPKI, umat Islam menuntut dasar negara yang berlandaskan Islam, namun akhirnya tercapai kesepakatan dalam Piagam Jakarta, yang menyatakan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya." Setelah proklamasi kemerdekaan, ketegangan muncul karena umat Kristen dan Katolik di Indonesia bagian timur keberatan dengan kalimat tersebut, dan akhirnya tujuh kata itu dihapus demi menjaga persatuan bangsa. Menurut Alamsjah, penghapusan ini merupakan pengorbanan umat Islam, yang pantas disebut sebagai hadiah bagi persatuan bangsa. Namun, Alamsjah juga menekankan bahwa selain umat Islam, umat non-Muslim juga turut berkorban demi kemerdekaan Indonesia.³⁵

Alamsjah menjelaskan mengenai penguatan ideologi dan Pancasila kepada umat beragama. Dari penjelasan tersebut, menjadi jelas bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Berdasarkan latar belakang lahirnya Pancasila, Alamsjah menyatakan, "Pancasila adalah pengorbanan dan hadiah umat Islam." Pernyataan ini merujuk pada catatan sejarah, di mana umat Islam melalui perwakilan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersedia mengganti tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya" menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa" demi menjaga persatuan bangsa.

Setelah menjelaskan mengenai Pancasila, Alamsjah beralih menjelaskan masalah aliran kepercayaan, yang masih menjadi persoalan yang dipertanyakan oleh masyarakat, khususnya umat beragama. Masalah ini dianggap mengkhawatirkan, terutama oleh kelompok agama, khususnya umat Islam, yang memandangnya dari sudut pandang agama dan politik. Kelompok ini khawatir bahwa aliran kepercayaan dapat mengacaukan agama atau melemahkan kehidupan beragama. Sementara itu,

³² Parikesit and Sempurnadjaja, p. 244.

³³ Perwiranegara, *Kehidupan Beragama Dalam Negara Pancasila*.

³⁴ Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung, 1987).

³⁵ Parikesit and Sempurnadjaja, pp. 249-54.

kelompok lain memandang masalah aliran kepercayaan dari sudut pandang hukum formal dan sosiologis, yakni sebagai realitas sosial dalam masyarakat.³⁶

Faktanya, umat Islam merasa khawatir bahwa aliran kepercayaan ini akan berkembang menjadi agama baru, yang dapat menyebabkan munculnya ratusan agama di Indonesia di masa depan. Namun, untuk menyelesaikan persoalan ini, Alamsjah menjelaskan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama, melainkan bagian dari kebudayaan, yang seharusnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Kementerian Agama.³⁷

Pernyataan Alamsjah diterima dengan baik oleh umat beragama, khususnya umat Islam, dan berhasil menyelesaikan ketakutan yang timbul terkait kemungkinan pembentukan agama baru. Presiden Soeharto pun mempertegas hal ini pada 16 Agustus 1978, melalui surat edaran Menteri Agama kepada gubernur tingkat 1 di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam negara Pancasila, tidak ada pengakuan terhadap tata cara perkawinan, sumpah, atau penguburan berdasarkan keyakinan agama, dan aliran kepercayaan tidak dapat disebut sebagai agama dalam catatan penduduk atau dokumen lainnya. Umat beragama yang mengikuti aliran kepercayaan tidak akan kehilangan agama mereka. Dengan demikian, tidak ada tata cara perkawinan atau sumpah yang berdasarkan keyakinan agama yang diakui secara formal.

Selain disambut baik oleh umat Islam, kebijakan Alamsjah juga mendapat respons positif dari Menteri Dalam Negeri. Sebagai Menteri Agama, ia bertanggung jawab menjalankan tugas pokok yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1975, yang mencakup penyelenggaraan fungsi administrasi umum dan pembangunan khusus dalam bidang agama. Tugas ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang mencakup aspek fisik dan spiritual. Pembangunan agama dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan, karena keduanya bertujuan untuk pembangunan manusia secara menyeluruh dan memajukan seluruh rakyat Indonesia.³⁸

Pembangunan nasional mencakup lebih dari sekadar aspek fisik seperti sandang, pangan, jalan, dan perumahan. Pembangunan juga harus melibatkan aspek spiritual, kemerdekaan, keamanan, dan pendidikan. Dengan demikian, pembangunan fisik dan mental harus berjalan seimbang. Dalam konteks pembangunan keagamaan, ada enam hal penting yang harus diperhatikan: pertama, kehidupan beragama harus selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dengan menegaskan bahwa Pancasila bukanlah agama dan agama tidak boleh diperlakukan sebagai Pancasila. Kedua, kerukunan antar umat beragama harus diutamakan untuk memperkuat solidaritas dan persatuan nasional. Ketiga, agama harus diamalkan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Keempat, lembaga-lembaga keagamaan, termasuk pendidikan agama, harus diperkuat mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kelima, pelayanan dan kemudahan ibadah haji bagi umat Islam harus terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Keenam, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu agama.

Persoalan mengenai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk mencegah terbentuknya agama baru. Langkah-langkah yang diperlukan harus dilaksanakan dengan lebih efektif, memastikan bahwa kepercayaan tersebut sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, penting untuk menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus tetap berada dalam kerangka Pancasila, yang menjadi dasar negara dan pedoman bagi umat beragama di Indonesia.³⁹

Alamsjah memutuskan beberapa kebijakan strategis, antara lain terkait pembebasan izin dakwah. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan rasa saling curiga antara umat Islam dan pemerintah. Berdasarkan arahan Presiden dan pembahasan dengan Kaskopkamtib pada 20 Mei 1978, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 44 Tahun 1978 pada 23 Mei 1978 mengenai pembebasan izin dalam aktivitas dakwah dan kuliah subuh. Surat keputusan ini menyatakan bahwa tidak diperlukan lagi surat izin untuk melakukan aktivitas dakwah dan kuliah subuh. Dakwah dan kuliah subuh

³⁶ M Fuad Nasar, *Islam Dan Muslim Di Negara Pancasila* (Gre Publishing, 2017).

³⁷ Parikesit and Sempurnadajaja, p. 248.

³⁸ Azra and Umam, p. 335.

³⁹ Perwiranegara, *Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia*.

harus dilaksanakan dengan tujuan memperkuat akhlak dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Lebih lanjut, dakwah dan kuliah subuh harus dilakukan tanpa bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan tidak mengganggu stabilitas negara. Selain itu, juga disarankan untuk menayangkan adzan menjelang setiap waktu shalat di jam tayang yang telah ditentukan.

Kebijakan lainnya yang diambil oleh Alamsjah adalah memperkuat kerukunan antar umat beragama. Kebijakan ini mencakup tiga poin penting: pertama, kerukunan antar umat beragama; kedua, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah; dan ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan sesama. Hal ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan dalam masyarakat Indonesia yang beragam.⁴⁰

Guna meningkatkan kesejahteraan dan kedisiplinan karyawan, Alamsjah membentuk koperasi simpan pinjam dan konsumsi, mendirikan klinik, merenovasi tempat bersalin, serta menyediakan alat transportasi antar jemput sebanyak 18 bus untuk setiap kompleks perumahan. Setiap pegawai mendapatkan jatah makan siang. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan karyawan, Alamsjah memberlakukan aturan ketat pada jam kerja kantor, di mana karyawan harus sudah berada di kantor tepat pada jam 07:30 dan pulang pada jam 15:00.⁴¹

Selain itu, Alamsjah berfokus pada peningkatan pelayanan ibadah haji dan umrah. Untuk menyempurnakan pelayanan haji, beliau menetapkan prinsip-prinsip pokok, seperti pengelompokan jamaah haji berdasarkan pemimpin dan daerah masing-masing, adanya petugas medis dan pemandu haji di antara jamaah, serta penerapan sistem catering agar jamaah dapat fokus pada ibadah. Dalam penyelenggaraan umrah, menteri agama bersama dengan Kementerian Kehakiman menetapkan kebijakan bersama mengenai perjalanan umrah, yang hanya dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum yang dapat dipercaya. Perjalanan umrah pun hanya dapat dilaksanakan satu bulan setelah bulan haji, dan berakhir dua bulan sebelum bulan haji berikutnya.⁴²

Departemen Agama juga membentuk tim untuk menyusun RUU Peradilan Agama. Kebijakan ini disahkan dalam Surat Keputusan Bersama pada tanggal 7 Januari 1983, yang mencakup berbagai keputusan penting seperti forum kerjasama di bidang administrasi, sumber daya manusia, dan peradilan agama, pengawasan hakim pada peradilan agama, serta pengawasan pemberian bantuan hukum. Selain itu, upaya untuk merampingkan rekrutmen hakim pada peradilan agama juga menjadi fokus dalam kebijakan ini.

Alamsjah giat meningkatkan hubungan dengan negara-negara Islam. Salah satu kebijakan yang diambil adalah menyelenggarakan Kongres Media Islam Sedunia yang pertama di Jakarta pada 1-3 September 1983, yang diikuti oleh 450 peserta. Kongres ini berhasil menghilangkan permasalahan negatif yang menyebut Indonesia bergerak menuju sekularisme dan membuktikan kepada dunia bahwa negara Pancasila merupakan alternatif yang cocok bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi agama. Selain itu, atas persetujuan bersama Menteri Agama dan Presiden, Prof. H. Anton Timur Djaelani ditunjuk sebagai Ketua Dewan Masjid Se-Asia Pasifik dengan pusat markas di Masjid Istiklal pada tahun 1982.

Menteri Agama juga menyampaikan kebijakan mengenai libur puasa yang berkenaan dengan pelajar Islam. Agar isu mengenai tidak adanya libur selama bulan puasa bisa diterima, Menteri Agama memberikan penjelasan lebih lanjut, mengacu pada kebijakan Presiden yang menegaskan bahwa pengembangan kehidupan beragama dan pendidikan selalu mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir tentang sekularisme atau anggapan bahwa undang-undang pendidikan nasional akan merugikan agama, karena aturan hukum yang berkaitan dengan pendidikan agama yang sudah ada akan tetap diberlakukan.⁴³

⁴⁰ Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982).

⁴¹ Parikesit and Sempurnadjaja, p. 262.

⁴² Perwiranegara, *Wilayah Kajian Agama Di Indonesia*, p. 117.

⁴³ Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama Di Indonesia*, p. 84.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alamsjah memiliki dedikasi luar biasa dalam mensejahterakan dan menyatukan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang keagamaan. Salah satu kontribusinya yang masih terasa hingga kini adalah pendirian masjid Amal Bhakti Pancasila di seluruh Indonesia, yang terus digunakan oleh umat Islam untuk beribadah. Dia juga mencetuskan trilogi kerukunan antar umat beragama yang tetap relevan dalam membangun masyarakat harmonis di Indonesia. Trilogi ini bertujuan untuk menciptakan kebersamaan dan persatuan di tengah perbedaan keyakinan, dengan menekankan pentingnya dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan kolaborasi antar komunitas keagamaan. Trilogi tersebut memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi bagi bangsa Indonesia ke depan adalah untuk terus memperkuat dialog antar umat beragama, meningkatkan kolaborasi antar komunitas keagamaan, serta memperkuat peran pemerintah dalam pembangunan kerukunan yang berkelanjutan demi menjaga keharmonisan sosial dan kemajuan bersama.

Daftar Acuan

- Arif, Suparman, Muhammad Basri, Maskun, Ali Imron, and Valensy Rachmedita, 'Sepanjang Jalan Pejuang (Peran Pejuang Dan Tokoh Lampung) Di Lampung', *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 8.1 (2022), 25-36
- Azra, Azyumardi, and Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998)
- 'De Tijd: Dagblad Voor Nederland, *Molukkers Betogen Bij Ambassade In Djakarta.*', N.v Drukkerij De Tijd, Amsterdam., 1974
- Depag, Amal Bakti Departemen Agama RI, *3 Januari 1946-3 Januari 1996: 50 Tahun Departemen Agama: Eksistensi Dan Derap Langkahnya* (Departemen Agama RI, 1996)
- Farchan, Yusa, 'Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru', *Jurnal Adhikari*, 1.3 (2022), 152-61
- Hamid, Abd Rahman, and M. Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2011)
- Hendrawan, Carlos, Maskun Maskun, and Suparman Arif, 'Kontribusi Alamsyah Ratu Perwiranegara Terhadap Penjaga Keamanan Rakyat Di Lampung Utara Tahun 1945', *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 7.4 (2019), 1-13
- 'Het Vrije Volk : Democratisch-Socialistisch Dagblad, Gehuwde Priesters Voor Indonisie Door Lambert Van Gelder.', De Arbeiderspers, Rotterdam., 1980
- Kusuma, Tomi, and Bahtiar Afwan, 'Upaya Membangun Stabilitas Nasional Pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru (1967-1971)', *Swarnadwipa*, 5.1 (2021), 18-28
- 'Leeuwarder Courant: Hoofdblad Van Friesland, Ambassadeur Van Indonesie VerlaatNederland', Stichting Leeuwarder Courant, Leeuwarden
- Nasar, M Fuad, *Islam Dan Muslim Di Negara Pancasila* (Gre Publishing, 2017)
- Nopansyah, Pedo, Alian Sair, and Farida Farida, 'Peranan Perwira Gyugun Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Di Palembang Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)', *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7.2 (2018)
- 'NRC Handelsblad, Indonesische Ambassadeur Terug Naar Zijin Land', Nieuwenhuis, Groningen, p. 1974
- 'NRC Handelsblad, Nieuwe Indonesische Ambassadeur Juwono Opinieuw Een Agaeneral', Nieuwe Rotterdamse Courant, 1974
- 'NRC Handelsblad, Alamsjah', Nieuwe Rotterdamse Courant, 1974
- 'NRC Handelsblad, Pasar Malam In De Rai.', Nieuwe Rotterdamse Courant, Rotterdam., 1972
- Padiatra, Aditia Muara, 'Introduction To Malari : Dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh Pada Awal Orde Baru 1970 - 1974', *Criksetra*, 4.8 (2015), 103-19
- Parikesit, Suparwan G., and Krisna R. Sempurnadjaja, *H Alamsjah Ratu Perwiranegara: Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Perwiranegara, Alamsjah Ratu, *Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung, 1987)

- , *Kehidupan Beragama Dalam Negara Pancasila* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982)
---, *Pembinaan Kehidupan Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1981)
---, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982)
---, *Wilayah Kajian Agama Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982)
'Vrijie Stem : Onafhankelijk Weekblad Voor Suriname,Opening Ambonnees Jeugdcentrum In Ned.',
Stichting De Vrijie Stem, Paramaribo., 1973